

PENGARUH ALOKASI DANA DESA, JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS LAHAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 KABUPATEN SIGI

Ade wawan

wawanade678@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The Aims of this research are ; 1) to determine the impact of village funds allocation, total population and lands on the realization of property tax both in urban and rural area (PBB-P2); 2) to determine the impact of village funds allocation on the realization of property tax both in rural and urban areas (PBB-P2); 3) to determine the impact of total population on the realization of property tax both in rural and urban areas (PBB-P2); 4) to determine the impact of lands on the realization of property tax both in rural and urban areas (PBB-P2). The research involves 64 villages from 15 districts in Sigi Regency that selected through purposive sampling. Method of research is descriptive quantitative and qualitative with multiple linear regression analysis. The results have found that: 1) Village fund allocation, total population and lands simultaneously have positive and significant impact on the realization of property tax both in urban and rural area (PBB-P2) with adjusted R-Square of 0,561 or 56,10% on significance 0,000; 2) Village Funds allocation partially has insignificant impact on the realization of property tax both in urban and rural area (PBB-P2) with t_{value} of 0,759 on significance of 0,431; 3) total population partially has significant impact on the realization of property tax both in urban and rural area (PBB-P2) with t_{value} of 3,861 on significance of 0,001; 4) Lands partially has significant impact on the realization of property tax both in urban and rural area (PBB-P2) with t_{value} of 3,466 on significance of 0,000.

Keywords: Village fund allocation, total population, lands, and property tax both in urban and rural area (PBB-P2).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan

Pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal

pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah.

Salah satu pajak yang merupakan penerimaan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada mereka yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. PBB dalam hal bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia sudah termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun di atas tanah atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah saat ini. Pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan. Pembagian penerimaan pajak pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Cahyono (2009) peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, jadi Cahyono menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak yang baru.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa. Penjabaran

kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi, dengan adanya desentralisasi dan otonomi Desa maka Desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa kiranya dapat meningkatkan pembangunan di Desa, dengan meningkatnya pembangunan di Desa penerimaan PBB akan meningkat dikarenakan masyarakat akan melihat manfaat nyata dari pengeluaran yang digunakan untuk membayarkan pajak pada pemerintah pusat.

Dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sangat bergantung kepada luas tanah. Semakin besar luas tanah maka NJOP semakin tinggi sehingga penerimaan PBB juga semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan jumlah luas lahan yang digunakan, maka penerimaan PBB pun juga akan mengalami kenaikan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk survei. Penelitian survei adalah merupakan penelitian yang memakai urutan sampel dari suatu populasi. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pemilihan yang bersifat verifikatif yaitu penelitian yang menggunakan penyajian jawaban dari hasil pemikiran yang kebenarannya bersifat sementara (hipotesis). Demikian pula data mengenai hubungan antara variable-variabel dalam penelitian ini juga dianalisis dengan metode verifikatif dengan bantuan urutan-urutan statistik yang relevan dengan data tersebut.

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2010). Pemilihan sampel pada

penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Berdasarkan tehnik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 64 Desa di Kabupaten Sigi.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Dalam operasional variable, masing-masing variable diuraikan definisi operasional. Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (X1)

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana Desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat kiranya dapat memberikan bukti nyata manfaat dari masyarakat membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Jumlah Penduduk (X2)

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, Cahyono (2009) peningkatan pendapatan nasional tersebut akan menciptakan wajib pajak baru, jadi Cahyono menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani dengan serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tapi jika penambahan

penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas maka jumlah penduduk hanya akan menjadi beban negara dan tidak akan menghasilkan atau menambah wajib pajak yang baru.

3. Luas Lahan (X3)

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objek PBB itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Untuk memudahkan penghitungan PBB yang terutang, tanah perlu diklasifikasikan (Soemitro, 2007). Yang dimaksud dengan klasifikasi tanah adalah pengelompokkan tanah menurut nilai jualnya, dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a) letak tanah, b) peruntukan tanah, c) pemanfaatan, d) luas lahan / bumi, e) kesuburan atau hasil tanah, f) adanya irigasi atau tidak dan lain sebagainya.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) (Y)

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki/dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. PBB merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan maupun pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Karena itu disetiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan di Indonesia (kecuali bumi dan bangunan yang dikecualikan) akan dikenakan pajak. Pengenaan PBB tidak terkait sama sekali dengan bukti pemilikan tanah dan atau bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak Waluyo (2011).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier

berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis terhadap data penelitian (uji asumsi) yang meliputi : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara beberapa variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Jumlah Penduduk (X1), Alokasi Dana Desa (X2), dan Luas Lahan(X3) sedangkan variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y). Untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) dengan formulasi sebagai berikut (Sugiyono, 2001)

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 \dots\dots + b_n X_n + e$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

X1 = Alokasi Dana Desa

X2 = Jumlah Penduduk

X3 = Luas Lahan

a = Konstanta

b₁ – b_n = Parameter yang diberi nama koefisien regresi

e = Variabel gangguan (*standard error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015. PBB merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan maupun pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Karena itu disetiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan di Indonesia (kecuali bumi dan bangunan yang dikecualikan) akan dikenakan pajak. Pengenaan PBB tidak terkait sama sekali dengan bukti pemilikan tanah dan atau bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan Tjahyono dan Husein (2011).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ayat (1), yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan ole orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Penerimaan PBB P2 Kabupaten Sigi dari tahun 2013-2014 rata-rata mengalami peningkatan sedangkan dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan yang tinggi. Penurunan yang paling tinggi terjadi di Desa Watubula yaitu sebesar -657.33%.

Kenaikan yang terjadi di tahun 2013 tersebut dikarenakan pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sigi mengeluarkan aturan yang mengharuskan untuk setiap Pemerintah Desa harus melampirkan bukti pelunasan PBB P2 pada saat proses pencairan Dana Desa yang akan diterimah, namun pada tahun 2014 terjadi pembahasan kembali mengenai aturan tersebut yang memutuskan aturan tersebut untuk tidak diberlakukan atas dasar bahwa Dana Desa tidak terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Proporsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sigi Tahun 2015 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini bahwa Alokasi Dana Desa yang tertinggi yaitu sejumlah Rp. 624,415,360.58 pada Desa Kalukubula dan Desa yang mendapatkan ADD paling rendah yaitu Desa Sibonu sejumlah Rp. 249,939,721.58, sedangkan rata-rata Alokasi Dana Desa pada sampel penelitian ini yaitu sejumlah Rp. 370,929,513.14.

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Desa Kalukubula merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi yaitu sebanyak 10.098 jiwa, sedangkan Desa Berdikrai merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang paling rendah yaitu sejumlah 142 jiwa, rata-rata jumlah penduduk Kabupaten Sigi yaitu sejumlah 1.314 jiwa.

Luas Lahan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain daripada tanah. Jadi yang menjadi objek PBB itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Untuk memudahkan penghitungan PBB yang terutang, tanah perlu diklasifikasikan (Rahman, 2010). Yang dimaksud dengan klasifikasi tanah adalah pengelompokan tanah menurut nilai jualnya, dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a) letak tanah, b) peruntukan tanah, c) pemanfaatan, d) luas lahan / bumi, e) kesuburan atau hasil tanah, f) adanya irigasi atau tidak dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, Desa yang memiliki luas lahan yang paling tinggi yaitu Desa Tomado yaitu seluas 9,839,719.00 Km², sedangkan Desa yang memiliki luas lahan yang paling rendah yaitu Desa Porame yaitu seluas 222,568.00 Km². Rata-rata luas lahan yang dimiliki Kabupaten Sigi tahun 2015 yaitu seluas 2,408,794.53.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji yang digunakan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kolineritas yang tinggi antar variabel bebas dalam model penelitian ini atau tidak terdapat multikolineritas.

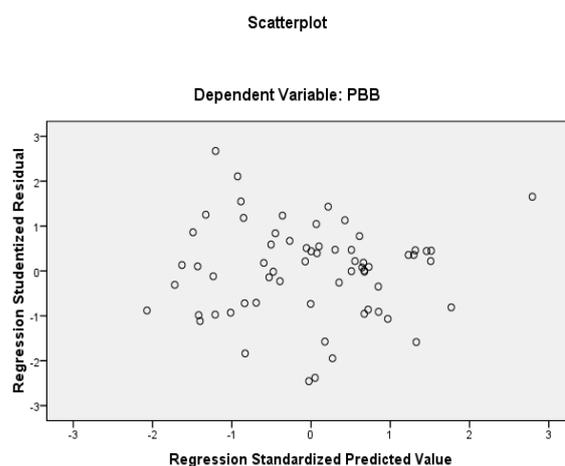
Tabel 1. Nilai VIF dan Tolerance

No.	Variabel	Tolerance	VIF
1	ADD	0,855	1,170
2	Jumlah Penduduk	0,584	1,713
3	Luas Lahan	0,557	1,794

Sumber : Output SPSS Versi 21.0

Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

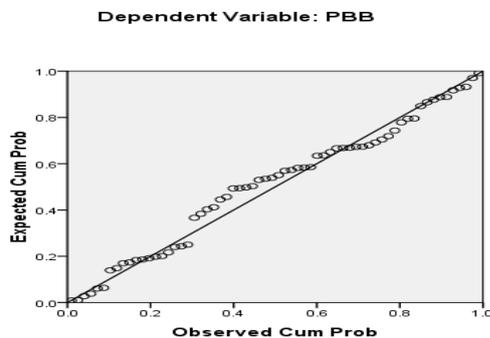


Gambar 1. Grafik Scatterplot

Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, nampak bahwa sebaran (pencaran) data berada di sekitar garis diagonal dan tidak ada yang

terpencar jauh dari garis diagonal, sehingga asumsi normalitas dapat dipenuhi.



Gambar 2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh Alokasi Dana Desa, jumlah penduduk, luas lahan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Regrsi linier berganda berfungsi untuk menganalisis keterkaitan dan keterhubungan Siantar dua atau lebih variabel penelitian yang berbeda, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda

No.	Variabel Independen	(Y= Realisasi PBB P2)			
		(B)	Hasil Uji t	(Sig t)	R Parsial
1	Constanta (a)	1,083	-	-	-
2	ADD (X1)	0,310	0,795	0,431	0,102
3	Luas Lahan(X2)	0,369	3,861	0,000	0,446
4	Jumlah Penduduk (X3)	0,425	3,466	0,001	0,408
<i>Multiple Regresi</i>		= 0,763	<i>F Hitung</i>		= 27,823
<i>R Square</i>		= 0,582	<i>Signifikansi</i>		= 0,000
<i>Adjusted R Square</i>		= 0,561			

Sumber: Output SPSS V 21.0

Tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,561. Hal ini berarti bahwa variasi variabel Alokasi Dana Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan dapat menjelaskan variasi variabel

Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Sigi sebesar 56,10%, sedangkan sisanya sebesar 35,10% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian (PDRB Per Kapita, Nilai Jual Objek Pajak, insentif pemungut pajak dan sarana/prasarana).

Nilai koefisien korelasi (*Multiple R*) adalah sebesar 0,763. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara variasi variabel Alokasi Dana Desa, jumlah Penduduk dan Luas Lahan dapat menjelaskan variasi variabel Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Hasil pengolahan data pada tabel 4.2 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y = 1,083 + 0,310 X_1 + 0,369 X_2 + 0,425 X_3$$

Persamaan Regresi Linier diatas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki arah pengaruh positif terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien regresi konstanta (a) sebesar 1,083
Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel Alokasi Dana Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan naik sebesar 1 maka realisasi penerimaan PBB P2 akan naik sejumlah 1,081
2. Koefisien regresi beta (b₁) sebesar 0,310
Nilai koefisien regresi b₁ ini memberikan arti ditemukannya hubungan positif antara Alokasi Dana Desa dengan Realisasi PBB P2, dimana setiap peningkatan Alokasi dana Desa sebesar 1, maka akan menaikkan Penerimaan PBB P2 sebesar 0,310 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Koefisien regresi beta (b₂) sebesar 0,369
Nilai koefisien regresi b₂ ini memberikan arti ditemukannya hubungan positif antara Luas Lahan dengan Penerimaan PBB P2, dimana setiap peningkatan Luas Lahan sebesar 1, maka akan menaikkan Penerimaan PBB P2 sebesar 0,369 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
4. Koefisien regresi beta (b₃) sebesar 0,425
Nilai koefisien regresi b₃ ini memberikan arti ditemukannya hubungan positif antara

Jumlah Penduduk dengan Penerimaan PBB P2, dimana setiap peningkatan Jumlah Penduduk sebesar 1, maka akan menaikkan Penerimaan PBB P2 sebesar 0,425 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Pengujian Pengaruh Simultan

Berdasarkan hasil uji anova diperoleh F hitung sebesar 27,823 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.000 (signifikan). Syarat uji yang digunakan adalah apabila pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) nilai probabilitas (*probabilitas value*) koefisien regresi lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis alternatif (H1) diterima. Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien regresi sebesar 0.000 atau lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu hipotesis pertama (H1) diterima, berarti variabel bebas dalam penelitian ini terbukti secara bersama-sama mempengaruhi Realisasi Penerimaan PBB P2 Kabupaten Sigi.

2. Pengujian Pengujian Parsial

a. Alokasi Dana Desa (X_1)

Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien regresi Alokasi Dana Desa (X_1) sebesar 0,431 atau lebih besar daripada 0,05, oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dalam ditolak

b. Jumlah Penduduk (X_2)

Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien regresi X_2 sebesar 0,001 atau lebih kecil daripada 0,05, oleh karena itu hipotesis Ketiga (H3) diterima.

c. Luas Lahan

Berdasarkan komputasi data dengan bantuan SPSS diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien regresi X_2 sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05, oleh karena itu hipotesis Keempat (H4) diterima.

Pembahasan

Pengaruh ADD, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan terhadap PBB-P2

Berdasarkan hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variable independent Alokasi Dana Desa (X_1), jumlah penduduk (X_2) dan luas lahan (X_3) merupakan faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sigi.

Pengaruh yang diberikan oleh variable ini dapat menaikkan atau menurunkan realisasi penerimaan PPB P2. Melihat nilai koefisien regresi variable independent tersebut bernilai positif yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh searah antara variable independen dan variable dependen, sehingga dari hasil koefesin regresi (lampiran II) dapat diketahui jika Alokasi Dana Desa (X_1), jumlah penduduk (X_2) dan luas lahan (X_3), maka realisasi penerimaan PBB P2 (Y) akan meningkat pula.

Pengaruh ADD terhadap PBB-P2

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh tidak signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Hal ini dapat dilihat dengan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,432 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Desa belum dikelola dengan baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari penggunaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk Desa. Selain dari hal tersebut Dana Alokasi Desa yang digunakan sebesar 70% belum maksimal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga pembangunan tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk membayar PBB-P2.

Pemerintah Kabupaten Sigi sempat mengeluarkan aturan dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa harus disertai dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, namun aturan tersebut dihapuskan setelah dilakukan

pembahasan kembali yang menghasilkan bahwa “Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh secara langsung dengan Pajak Bumi dan Bangunan”, berdasarkan hal tersebut maka aturan yang mengharuskan dilampirkannya bukti pelunasan PBB P2 dalam hal pencairan dana ADD dihapuskan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PBB-P2

Hasil uji parsial yang dilakukan terhadap variabel jumlah penduduk terhadap variabel realisasi penerimaan PBB P2 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Sigi. dengan melihat nilai signifikansi variabel jumlah penduduk sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Angka koefisien elastisitas jumlah penduduk sebesar 0,310 berarti menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah penduduk dengan penerimaan PBB di Kabupaten Sigi.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hadi Sasana (2005) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Jumlah penduduk bisa tetap ditangani dengan serius, agar seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah juga wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sigi. Jumlah penduduk tidak hanya menjadi beban di daerah Kabupaten Sigi tetapi penduduk yang sebelumnya belum menjadi wajib pajak dapat berubah status menjadi wajib pajak. Wajib pajak di Kabupaten Sigi pada umumnya telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Tapi jika masih ada wajib pajak yang enggan membayar pajak dapat diberikan sanksi yang tegas, dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif.

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk

yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, yang berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Luas Lahan Terhadap PBB-P2

Hasil uji parsial yang dilakukan terhadap variabel luas lahan terhadap variabel realisasi penerimaan PBB P2 diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P2 Kabupaten Sigi dengan melihat nilai signifikansi variabel luas lahan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05.

Angka koefisien elastisitas jumlah luas lahan sebesar 3,861 berarti menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah luas lahan dengan penerimaan PBB di Kabupaten Sigi. Angka elastisitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah luas lahan yang menjadi objek PBB di Kabupaten Sigi sebesar 1 persen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, akan meningkatkan penerimaan PBB sebesar 3,861. Semakin besar luas lahan yang dimiliki, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh, dan pada akhirnya akan menambah kemampuan mereka untuk membayar PBB. Dengan demikian, setiap penambahan luas lahan yang dimanfaatkan masyarakat, selain akan menambah jumlah wajib pajak baru, tentunya juga akan menaikkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga akan meningkatkan penerimaan PBB.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2005) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan hasil penelitian ini maka pemerintah Kabupaten Sigi hendaknya melakukan pengawasan untuk setiap kepemilikan lahan di Daerah Kabupaten Sigi untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Banguna Pedesaan dan Perkotaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Alokasi Dana Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sigi.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sigi.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sigi.
4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Luas Lahan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Sigi.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dapat meningkat sesuai target yang diharapkan pemerintah Kabupaten Sigi hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan perhitungan statistik, bahwa variabel luas lahan dan, jumlah penduduk sangat mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Guna mengintensifkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sigi disarankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban masih perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan yang terus menerus oleh

instansi terkait dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel lainnya, seperti variabel jumlah insentif pemungut pajak, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dan sebaiknya menambah pengamatan dalam kurun waktu yang lebih lama lagi sehingga dapat menghasilkan asumsi yang lebih baik.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. H. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Abdul Kahar,SE.,M.Si.,Ak. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Imam, Cahyono. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Penerbit Amus, Yogyakarta.
- Indonesia. 1994. *Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Rahman, Abdul. 2010, *Panduan administrasi perpajakan*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Sasana, H. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*, Dinamika Pembangunan, Vol. 2, Juli 2005, Hal. 19-29.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*, Edisi VI, Penerbit Alfabeta, Bandung.

- Sumitro, Hadi 2007. *Pengelolaan Pajak Daerah*. Bandung: Salemba Empat. Jakarta.
- Tjahyono dan Husein. 2011. *Panduan Lengkap Tata cara Perpajakan Di Indonesia*. Visi Media, Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.